

KERAPUHAN EVIDENSI DALAM CIVIC LITERACY

Andri Fransiskus Gultom

Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Email: andri.franz@unikama.ac.id

Keywords:

*fragility of
evidence, civic
literacy,
philosophical
criticism.*

Abstract

The debate about civic literacy in philosophical discourse in Indonesia is still rare. This paper may have initiated this debate by anchoring philosophical criticism to the research of Armaidy Armawi and Raharjo in the Journal of Philosophy Vol 31, No. 1 of 2021 entitled: "Evaluation of Civic Literacy Socialization Program in the Formation of Young Citizen Ethics." The fundamental aim of this paper lies in the power to critique research that has fragile evidence in the discussion of civic literacy. This study uses qualitative methods with verstehen, trouble mapping, interpretation, and Myra Zarnowski's thought experiments. The research findings: first, the fragility of the evidence occurred in the two researchers due to experiencing the epistemological break. Second, the fragility of the two researchers' evidence is in the content of civic literacy because the evaluation of the two researchers missed by presenting lack of data so that the peak achievement in civic literacy is not directed at the well-inform citizens, but is concerned with the explanatory bias that exists in ethics. The recommendations of this study focus on civic literacy, which contains a structure on reading themes and civic values that can answer the needs of citizens. The implication is sense of the citizens engagement to realizing social justice.

Abstrak

Kata kunci:
*kerapuhan
 evidensi, civic
 literacy, kritik
 filosofis.*

Perdebatan ihwal civic literacy dalam diskursus filsafat di Indonesia masih jarang ditemukan. Tulisan ini boleh jadi menginisiasi perdebatan tersebut dengan menjangkarkan kritik filosofis pada penelitian Armaidy Armawi dan Raharjo di Jurnal Filsafat Vol. 31, No. 1 tahun 2021 berjudul: “Evaluasi Program Sosialisasi Civic Literacy Dalam Pembentukan Etika Warganegara Muda”. Tujuan mendasar dari tulisan ini ada pada kekuatan untuk memberi kritik pada penelitian yang memiliki kerapuhan evidensi dalam pembahasan tentang civic literacy. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan *verstehen*, trouble mapping, interpretasi, dan eksperimen pikiran Myra Zarnowski. Temuan penelitian meliputi: pertama, kerapuhan evidensi terjadi pada kedua peneliti karena mengalami the epistemological break. Kedua, kerapuhan evidensi kedua peneliti ada pada konten civic literacy karena evaluasi kedua peneliti meleset dengan menghadirkan minus data sehingga capaian puncak pada civic literacy bukan terarah pada the well-inform citizens, tetapi berkuat pada bias ekplanasi yang ada pada etika. Rekomendasi penelitian ini terarah pada civic literacy yang memuat struktur tentang tema-tema bacaan dan nilai-nilai kewargaan yang bisa menjawab kebutuhan warga negara. Implikasinya, keterlibatan warga untuk peka mewujudkan keadilan sosial.

Pendahuluan

Diskursus tentang kecakapan seseorang atau komunitas dalam hal literasi memiliki beragam paradigma. Paradigma konvensional mengafirmasi bahwa ada pertautan langsung antara kecakapan membaca dengan tingkat kecerdasan. Interpretasi sederhananya, seseorang atau komunitas yang membaca banyak buku dengan serta merta memiliki kecerdasan yang bisa menambah wawasan dalam *milieu* akademik. *De facto*, institusi-institusi pendidikan formal memiliki keyakinan adekuat pada paradigma konvensional (termasuk kemampuan membaca komprehensif) tersebut, dengan menerapkan tes-tes bahasa (seperti TOEFL, TOEIC, IELTS) sebagai syarat masuk menjadi mahasiswa-i, terutama di Perguruan Tinggi Negeri, untuk menjadi *civil servant* di Badan Usaha Milik Negara, dan menjadi

karyawan di Korporasi Nasional serta Internasional.

Paradigma lainnya yang cukup menantang adalah paradigma bahasa dan dunia yang dihembuskan oleh Edward Sapir dalam bukunya *Language: An Introduction to the Study of Speech*. Buku ini memberikan paradigma khusus tentang subyek bahasa ketimbang kumpulan fakta. Sapir (2004) menegaskan bahwa pemahaman bahasa mencakup variabilitas dalam ruang dan waktu, dan bertautan dengan beragam problem manusia yang menantang seperti problem pikiran, proses historis, ras, budaya, dan seni. Paradigma ini, tulis Sapir (2004), bisa berguna untuk kemampuan bahasa para pelajar dan publik di luar pendidikan formal (*the outside public*). Situasi itu untuk menyadari bahwa ada tendensi untuk mereduksi bahasa sebagai bentuk keangkuhan seseorang yang berimplikasi menjadi bentuk kekosongan pikiran dan terjadinya kecerobohan. Intinya, tingkat melek bahasa dalam diri para pelajar bisa memperluas pengetahuan dengan indikator-indikator sikap.

Kedua paradigma di atas mendistingsikan bahwa yang pertama ada dalam ruang pendidikan formal, dan yang kedua berada dalam pendidikan non formal. Kedua paradigma tersebut menjadi menarik bila dijangkarkan dalam konteks *civic literacy* di Indonesia. *Civic literacy* menjadi diskursus dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), dan saya tertarik untuk mengkajinya, terlebih adanya kerapuhan evidensi dalam artikel yang mengkaji tentang "Evaluasi Program Sosialisasi *Civic Literacy* Dalam Pembentukan Etika Warganegara Muda" (Armawi & Raharjo, 2021) Artikel tersebut mengernyitkan dahinya atau membingungkan saya karena kekurangan *insight*, *minus data*, dan untuk melihat adanya daya mentak (kemungkinan) dari para peneliti untuk melakukan terobosan kritis dan evaluatif tentang *civic literacy*. Padahal, awal kehadiran *civic literacy* ada pada pesonanya yaitu daya kritis bagi para warga negara dalam mewujudkan *civic intelligent*, *civic responsibility*, dan *civic participation* (Winarno, 2011; Thakur & Thomas, 2014).

Pembelajaran baik formal maupun non-formal bila dihubungkan dengan *civic literacy*, maka bisa menggunakan beragam varian model yang mengarahkan warga negara (muda) untuk menjadi kritis. Varian model itu disebut pembelajaran multiliterasi kritis (Nurlinasari & Hamid, 2018). Pembacaan dengan beragam bidang ilmu tersebut tentunya relevan dengan pertanyaan mendasar yang diajukan Milner (2002), yaitu, apa yang perlu dihasilkan dan dipertahankan dalam *civic literacy*? (Pertanyaan ini yang nanti akan menjadi *concern* dalam tulisan Armawi dan Raharjo tentang evaluasi program sosialisasi *civic literacy* dalam pembentukan etika warganegara

muda).

Milner menekankan aspek partisipasi dalam *civic literacy*, terutama peran lembaga politik dan terutama keterlibatan dalam pemilihan umum untuk memberikan peta yang jelas dan bermakna bagi politik alternatif. Partisipasi, tulis Milner (2002), terkait erat dengan distribusi sumber daya intelektual dan pada gilirannya menjadikan *civic literacy* menjadi program penting dalam memajukan suatu negara. Untuk itu, Milner menulis,

"Institutions and policies promoting civic literacy, we shall show, can produce a virtuous circle by themselves fostering informed political participation. These, in their turn, can lead to more equitable socio-economic outcomes. Such outcomes encourage citizens to keep well informed of governmental decisions – beginning the cycle once again. Civic literacy is thus both end and means" (Milner, 2002: 2).

Adanya peran dari institusi negara melalui kebijakan membuat *civic literacy* memiliki kontribusi dari warga negara untuk memajukan negara. Dari sini, *civic literacy*, tulis Henry Milner (2002), tidak hanya mencakup mencakup pengetahuan politik, tetapi juga kesediaan untuk menerapkan pengetahuan itu melalui partisipasi politik.

Civic literacy dalam sejarah pemikiran di Amerika terpengaruh oleh aktivitas dari Tocquevillian (para pengikut Alexis de Tocqueville) dalam upaya untuk mengukur modal sosial kelas dari kelompok kelas atas di awal tahun 1960-an. Kemampuan membaca dalam konteks Amerika Serikat tidak hanya sekedar membaca teks di buku-buku untuk memperoleh informasi, namun kemampuan membaca buku dibarengi dengan keterampilan mengakses beragam informasi, program-program kebijakan, dan mampu bertindak sebagai warga negara dalam wujud praksis.

Dalam sebuah esai dari Converse (2006) menyimpulkan bahwa rata-rata warga negara Amerika mengalami kekurangan pada orientasi yang stabil pada politik dan memperlihatkan tingkat pengetahuan yang rendah, kurang konsisten pada sikap, ketidakstabilan pada tindakan politis, dan adanya jawaban kosong pada pertanyaan yang terbuka (tentang partisipasi politik). Sejak saat itu para pelajar politik di Amerika secara sistematis diuji kembali pernyataannya, menggaungkan pengetahuan warga negara tentang institusi politik Amerika, proses, dan para pemimpin, dengan menghasilkan bahwa, sebagai satu pengamat yang meringkas situasi (Bartels, 1996). Beragam indikator masif dari para pemilih di Amerika tersebut mengonfirmasi ekspektasi dari Downs tentang *rational ignorance*. Adanya *rational ignorance* nanti menjadi cikal bakal lahirnya *civic literacy* di Amerika Serikat.

Proyek untuk membangun peradaban suatu bangsa ada dengan

meningkatkan kecerdasan literasi warga negara dalam keterlibatan dalam politik juga terjadi di Indonesia (Sudibyo, 2010). Proyek tersebut ada dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk mengakomodir keterampilan mengenai *civic literacy*. *Civic literacy*, tulis Thakur & Thomas (2014), adalah suatu pengetahuan tentang bagaimana berpartisipasi secara aktif dalam melakukan perubahan di suatu komunitas masyarakat, sehingga sebagai masyarakat demokratis mereka dapat melaksanakan dan mengetahui fungsinya untuk menciptakan suatu perubahan yang damai.

Perkembangan pembelajaran PKn di Indonesia berkembang seiring dengan perkembangan demokrasi di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, menurut (Winarno, 2011) terdapat paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) diantaranya yaitu *civic intelligent*, *civic responsibility* dan *civic participation*. Adapun *output* yang diharapkan dari Pendidikan Kewarganegaraan ini dapat dijelaskan melalui tiga komponen, yaitu *civic knowledge*, *civic skills* dan *civic dispositions*. Ketiga komponen tersebut mendukung proyek *civic literacy* agar terhindar dari *rational ignorance*.

Metode

Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan *verstehen* (memahami teks secara baik secara *verbatim* dan dalam *thick description*), *trouble mapping* (memetakan duduk persoalan), interpretasi (menafsirkan pesan-pesan eksplisit dan implisit, dan menegaskan adanya kerapuhan evidensi dari tulisan Armawi dan Raharjo), dan eksperimen pikiran (yang diilhami oleh Myra Zarnowski). Adapun duduk perkara dalam tulisan ini adalah pertama, adanya kerapuhan evidensi terjadi pada kedua peneliti (Armawi dan Raharjo) karena mengalami patahan epistemologis. Kedua, kerapuhan evidensi kedua peneliti ada pada konten *civic literacy* yang dievaluasi dengan tidak menghadirkan bentuk evaluasi, baik secara kualitatif (rendah, menengah, tinggi) maupun kuantitatif (dalam bentuk numerik). Ada juga bias ekplanasi yang melulu mengarah keluguan dari etika.

Hasil dan Pembahasan

1. Status Quaestionis pada Civic Literacy

Saya memulai pembahasan dengan mendeskripsikan terlebih dahulu *status quaestionis* atau duduk masalah atas kajian yang dilakukan oleh Armaidly Armawi dan Raharjo. Lalu, saya *highlight* duduk perkara yang membuat penelitian mereka menjadi bias dan rapuh secara akademik.

Rangkaian argumen dan data akan dipertanyakan secara kritis, sembari memberi fokus secara detail pada kekurangan evidensi yang menjauhkan kedua peneliti dari prinsip mendasar *homo academicus* yaitu *academic honesty*.

Kedua peneliti memusatkan penelitiannya dua persoalan: *pertama*, bagaimana program sosialisasi *civic literacy* dalam pembentukan etika warga negara muda di Kota Surakarta? *Kedua*, bagaimana evaluasi program sosialisasi *civic literacy* dalam pembentukan etika warganegara muda di Kota Surakarta? (Armawi & Raharjo, 2021). Persoalan pertama diselesaikan dengan mendeskripsikan praktik pendidikan kewarganegaraan secara informal berupa kegiatan sosialisasi *civic literacy* dengan pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran. Lokus penelitian ada di komunitas Dusun Binaan Mutiara Ilmu dan Solo Mengajar. Pertanyaan kedua dijawab: pertama, bentuk evaluasi program yang dilakukan pada proses pembelajaran di mana seharusnya tentor memiliki sebuah buku pedoman atau pegangan yang dijadikan sebagai acuan sistematis dilaksanakannya sosialisasi *civic literacy*. Jawaban kedua, evaluasi program sosialisasi *civic literacy* dalam pembentukan etika warganegara muda di Kota Surakarta mengarahkan pada pola pembentukan warganegara yang baik. Hal tersebut diawali dengan memberikan penanaman nilai pengetahuan kewarganegaraan.

Kedua persoalan yang diajukan Armawi dan Raharjo, bagi saya menjadi problem baru yang bertambah rumit karena kurang-akuratan dalam mendeteksi pertanyaan dan memberi detail-detail untuk menjawab pertanyaan. Bila yang ditanyakan tentang evaluasi, maka kedua peneliti mesti mendasarkan pada rangkaian proses penelitian (*research and development*) dan rangkaian data (*data series*). Kedua dasar tersebut diasalkan kedua peneliti pada program sosialisasi, yang bagi saya perlu untuk dijernihkan arti dan tujuan sosialisasi tersebut.

Kedua peneliti merangkum arti sosialisasi dari David Goslin dan Peter Berger menjadi: "sebuah proses melaksanakan ide, dan proses atau aktivitas-aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerimanya dan melakukan penyesuaian terhadap partisipasi masyarakat di kelompoknya." (Armawi & Raharjo, 2021: 6). Pertanyaannya, apakah sosialisasi yang dimaksud ada dalam tahap pengenalan program *civic literacy*? Karena sosialisasi pada dasarnya dilakukan untuk memperkenalkan ide, gagasan, konsep dalam tahap memperkenalkan program kerja. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang melakukan sosialisasi, para peneliti atau para aktivis di komunitas baca? Bila pada tahap ini yang dipersoalkan, maka sosialisasi mestinya tidak bernama sosialisasi, karena pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah memperkenalkan dan

melaksanakan program prioritas yaitu Gerakan Literasi Nasional (GLN) sejak tahun 2016 (Puslitjakdikbud, 2019).

2. Kerapuhan Evidensi dan *the Epistemological Break*

Hal ihwal sosialisasi kemudian merapuhkan gagasan dasar kedua peneliti yang menskematisasi sosialisasi *civic literacy* memuat pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran (Armawi & Raharjo, 2021: 14). Kerapuhan skema tersebut idealnya ada dalam *grand design* manajemen penelitian: menyusun perencanaan program, melaksanakan program, memberi penguatan, dan mengevaluasi program (Terry, 1968). Lompatan logika yang dilakukan adalah mereka melakukan evaluasi dengan mendasarkan pada tahap sosialisasi. Padahal, secara mendasar sosialisasi itu berada pada tahap memperkenalkan program. Lompatan logika itu mestinya bisa dijembatani dalam (konteks *data series*) bila kedua peneliti mengakui bahwa pernah meneliti tentang penelitian yang pernah dilakukan di tahun 2017. Penelitian Armawi & Raharjo (ditambah Djoko Soerjo) berjudul “Penguatan *Civic Literacy* Dalam Pembentukan Warga Negara Yang Baik (*Good Citizen*) dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Warga Negara Muda (Studi Tentang Peran Pemuda HMP PPKn Demokratia Pada Dusun Binaan Mutiara Ilmu di Jebres, Surakarta, Jawa Tengah)” yang telah diterbitkan di Jurnal Ketahanan Nasional Vol.23, No.2, Agustus 2017, Hal 175-198.

Apa artinya? Kedua peneliti menjauhkan diri dan (pikiran mereka) dari *academic honesty*, bahwa pernah melakukan penelitian yang lokus penelitian sama (Dusun Binaan Mutiara Ilmu, Jebres, Surakarta). Keduanya tidak mencantumkan hasil penelitian di tahun 2017 sebagai bagian dari “penelitian sebelumnya” (untuk menentukan *state of the art*) dan juga tidak memberi ulasan di konten penelitian serta tidak mencantumkan penelitian tersebut di bagian daftar pustaka. Apakah ini kedua peneliti mengalami *rational ignorance* dengan mengambil sikap lupa atau lalai mencantumkan penelitian mereka sebelumnya? Bila asumsi ini dijadikan alibi, maka peristiwa lupa dan lalai tersebut adalah bentuk *the epistemological break* alias kecerobohan (pengetahuan) yang disengaja. Kecerobohan yang disengaja itu ibarat seorang komedian yang (pura-pura) jatuh saat mau duduk, padahal kursinya tidak ditarik oleh siapapun.

Untuk mendapatkan pokok-pokok deskripsi tentang *grand design* penelitian dan *data series*, saya *highlight* alur penelitian dari Armawi dan Raharjo sebagai bentuk *trouble mapping* (memetakan duduk persoalan).

Tabel 1. Trouble Mapping

Periode	2017	2018	2019	2020	2021
---------	------	------	------	------	------

Tahun					
Judul Riset	Penguatan Civic Literacy Dalam Pembentukan Warga Negara Yang Baik (<i>Good Citizen</i>) Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Warga Negara Muda (Studi Tentang Peran Pemuda HMP PPKn Demokratia Pada Dusun Binaan Mutiara Ilmu di Jebres, Surakarta, Jawa Tengah)	Masa kosong	Kedua peneliti menasarkan data: tiga fase dan kegiatan penguatan literasi	Masa kosong	Evaluasi Program Sosialisasi Civic Literacy Dalam Pembentukan Etika Warganegara Muda
Terbit di	Jurnal Ketahanan Nasional Vol.23, No.2, Agustus 2017, Hal 175-198				Jurnal Filsafat Vol. 31, No. 1 (2021) p. 1-23
Penulis	Raharjo, Armaidy Armawi, & Djoko Soerjo				Armaidy Armawi & Raharjo
Tempus Locus	2017 Dusun Binaan Mutiara Ilmu, Jebres, Surakarta.				2019 Komunitas Dusun Binaan Mutiara Ilmu dan Komunitas Solo Mengajar di Kota Surakarta
Actus	Pemuda HMP PPKn Demokratia Peneliti berfokus pada penguatan <i>civic literacy</i>				Peneliti mengobservasi berbagai perbedaan substansi <i>civic literacy</i> oleh setiap organisasi volunteer pendidikan. Hasil

		observasi awal menunjukkan terjadi perbedaan dalam muatan substansi civic literacy dari tiap organisasi volunter pendidikan di Surakarta.
Data	1. Proses penguatan <i>civic literacy</i> dilakukan dengan cara sosialisasi dan lomba civic literacy tingkat persentase kuesioner; 2. Implikasi terhadap ketahanan pribadi pemuda (tentor) dengan rata-rata sebesar 92% dan bagi murid 95%.	Tiga fase program sosialisasi civic literacy & kegiatan penguatan literasi terkait “pengembangan 15 menit membaca”

Armawi dan Raharjo menjauhkan diri dari *academic honesty*, karena ada penelitian sebelumnya (di tahun 2017) yang juga ditulis oleh Raharjo, Armaidly, dan Soerjo tentang penguatan *civic literacy*, tetapi saat naskah *publish* di jurnal filsafat 2021, para peneliti tidak mencantumkan penelitian sebelumnya dari mereka di daftar pustaka. Apa artinya? Ada tendensi untuk melakukan repetisi pada data lama (di tahun 2017). Tendensi ini terjadi disebabkan oleh minimnya informasi dan sumber-sumber kualitatif yang kurang adekuat. Poin saya dengan menyatakan bahwa para peneliti melakukan deskripsi dan bukan menginterpretasi adalah, karena mereka tidak membuat satu *insight* yang baru pada dua naskah yang telah terbit (satu di jurnal ketahanan nasional di tahun 2017) dan satu lagi di jurnal filsafat di tahun 2021). Ada kesejajaran gagasan konseptual dalam kedua penelitian itu. Armawi dan Raharjo bisa saja mengalami *involusi* dalam penelitian dengan

melakukan simplifikasi yaitu teknik parafrase. Misalnya di tahun 2017 (pemuda) diganti dengan di tahun 2021 (generasi muda, dan warga negara muda).

Lantas, bagaimana dengan masa kosong penelitian (2018, 2020) bisa menjadi data akurat bagi penelitian yang dipublikasikan di tahun 2021? Eksplanasi tentang masa dengan data kosong memiliki kemungkinan besar mengalami *missing evident* (pembuktian yang meleset). Data kosong, demikian tulis Golebiewski & Boyd (2018), bisa menghasilkan data keliru yang dapat dengan mudah dieksploitasi. Situasi ini sebenarnya bisa dijumpai bila kedua peneliti melakukan *academic honesty* dengan mengeksplisitkan bahwa mereka pernah melakukan penelitian sebelumnya tentang *civic literacy*. Bila data kosong diproblematik lebih mendalam, maka penelitian dengan rentang waktu yang mengabaikan prinsip *grand design* manajemen penelitian dan *data series*, memiliki kerapuhan evidensi. Kerapuhan tersebut karena begitu hasil dipublikasikan, maka kemungkinan besar langsung kedaluarsa (*out of date*). Kemungkinan ini karena data kosong dari masa penelitian yang tidak diakui oleh para peneliti amat dipengaruhi oleh situasi perubahan kondisi (*moving condition*) baik manusianya dan kebijakan dengan adanya faktor-faktor yang sangat cepat berubah seperti: sikap dan tingkah laku para peserta di komunitas baca, *mood* peserta saat membaca, persistensi peserta dan tutor, infrastruktur yang berubah, serta kondisi alamiah dari lingkungan komunitas baca tersebut. Ringkasnya, ada perubahan dalam diri warga negara baik itu dari dalam dirinya maupun karena adanya faktor dari luar dirinya (Gultom, Munir, & Ariani, 2019).

Bila Armawi dan Raharjo melakukan penelitian tahap lanjutan (melakukan evaluasi), mereka kurang adekuat untuk memetakan secara eksplisit perihal *locus*, *tempus*, dan *actus* dari penelitian mereka. Artinya, proses penelitian tidak diolah secara eksplisit dengan menyandarkan pada kekayaan data di lapangan. Mereka hanya menampilkan sedikit petikan wawancara dan tabel yang sebenarnya tidak memiliki koherensi yang adekuat pada fokus penelitian mereka yaitu melakukan evaluasi.

Evaluasi sebagai klimaks penelitian tidak secara tegas dinyatakan, karena evaluasi masih belum berada dalam distingsi yang jelas dengan saran atau rekomendasi. Hal ini secara eksplisit ada dalam kesimpulan bahwa dalam proses pembelajaran, tutor seharusnya memiliki sebuah buku pedoman atau modul yang dijadikan sebagai acuan sistematis dilaksanakannya sosialisasi *civic literacy*. Evaluasi ini diulangi lagi menjadi bentuk saran (hlm. 20). Selain itu, proses evaluasi dengan pembahasan yang logis yang dibarengi dengan beragam *datum* pun belum memberikan suatu kajian komprehensif bila penelitian itu terkategori sebagai evaluasi. Arti,

peneliti yang memosisikan diri sebagai evaluator atas penelitian yang pernah dilakukan mereka (di tahun 2017, yang tidak dibuat di penelitian terbaru di tahun 2021) masih terjebak pada *the last data memory*. Evaluasi yang dilakukan tidak didasarkan pada *trouble mapping*. Implikasinya, evaluasi tidak memiliki indikator-indikator yang detail tentang proses *civic literacy*.

Kritik logis lainnya bahwa ada lompatan berpikir saat Armawi dan Raharjo mendeskripsikan data di Surakarta (hlm. 11) terkait penguatan literasi (yang diklaim diolah peneliti di tahun 2019), lalu di halaman 12, para peneliti melompat ke akses data konten media sosial di Indonesia sebesar 97, 4 persen. Di sini ada kedua peneliti mengalami kekurangan data, terkait berbagai indikator dan aspek-aspek yang (mestinya) menjadi materi evaluasi. Idealnya, evaluasi diberikan dengan memberikan kualifikasi mendasarkan hasil pengamatan, atau bisa menguantifikasi data dalam bentuk statistik-numerik.

Tabel 2. Dimensi dan aktivitas warga negara pada *civic literacy*

Dimensi Civic Literacy	Aktivitas Warga Negara sebagai Indikator Mengevaluasi <i>Civic Literacy</i>
Dimensi Kecakapan (<i>Proficiency</i>)	kebiasaan untuk menambah pengetahuan, hiburan, atau berekspresi melalui tulisan
Dimensi Akses (<i>Access</i>)	Menggunakan fasilitas perpustakaan sekolah, adanya petugas pengelola perpustakaan sekolah, serta indikator akses di masyarakat seperti tergambar pada persentase perpustakaan umum, perpustakaan komunitas, rumah tangga yang membeli surat kabar, dan rumah tangga yang membeli majalah/tabloid
Dimensi Alternatif (<i>Alternatives</i>)	menggunakan perangkat elektronik dan teknologi informasi digital dalam mengakses sumber literasi (ebooks, website, ensiklopedi online)
Dimensi Budaya (<i>Culture</i>)	kebiasaan masyarakat dalam membaca surat kabar cetak, media elektronik/internet, rutin mengunjungi perpustakaan , pemanfaatan taman bacaan secara terjadwal, dan buku yang sering dibaca para pengunjung.

Evaluasi yang kedua peneliti klaim sebagai evaluasi lebih didasarkan pada hasil wawancara dan pengamatan tidak dilandasi oleh rincian indikator-indikator evaluasi (seperti yang tertera secara eksplisit di tabel 2). Tahap evaluasi dari kedua peneliti, bila mau dikategorikan sebagai bentuk evaluasi, maka memerlukan kelengkapan dan rincian data. Dari situ minimnya data memungkinkan terjadinya kerapuhan evidensi pada penelitian.

3. Kerapuhan Evidensi dan Bias Ekplanasi Pada Etika.

Hal ihwal kerapuhan evidensi kedua ada dalam penjelasan Armawi dan Raharjo tentang *civic literacy* yang bisa membentuk etika warga negara muda. Pertanyaan bantahan yang saya ajukan, bagaimana upaya membentuk etika dalam pendidikan non-formal (komunitas baca) khususnya melalui kemelekwacanaan dalam pendidikan kewarganegaraan? Bila jawaban yang diberikan sesuai pengamatan kedua peneliti bahwa ada pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran, maka komunitas baca (Komunitas Dusun Binaan Mutiara Ilmu dan Komunitas Solo Mengajar) telah sama seperti alur dan program dari pendidikan formal (seperti sekolah). Artinya, pertama ada kenaifan para peneliti dalam mengkaji program *civic literacy* bahwa gerakan membaca yang dilakukan komunitas-komunitas baca adalah untuk keluar dari pakem kaku dari sekolah, membiarkan para peserta untuk lebih leluasa membaca, dan menjadikan momen membaca terprogram seperti kurikulum dan silabus di sekolah.

Tafsiran kedua saya adalah pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran yang diklaim peneliti bisa membentuk etika warga negara muda berada ada wujud ke-nekad-an para peneliti yang melakukan simplifikasi untuk menyambung-hubungkan item-item kualitatif (seperti: sopan-santun, saling menghargai, toleransi) seperti dengan etika. Padahal beragam item itu adalah bentuk-bentuk dari etiket (yang berbeda dari etika) seseorang yang lebih dipengaruhi oleh budaya Jawa (seperti: *ewuh pakewuh*, *tepo seliro*, dan *sungkan*) dengan basis tercipta keselarasan dalam hidup. Dalam konteks ini, kedua peneliti menarik sangat jauh persoalan *civic literacy* dan mengambil peran besar padanya sampai pada dimensi universal yaitu etika. Persis di situlah bias ekplanasi kedua peneliti. Realitas mikro dalam *civic literacy* pada diri warga negara muda ditarik kesimpulan pada etika dan bentuk ketahanan diri.

Ekplanasi yang bias berikutnya, kedua peneliti lalai pada konten bacaan. Mereka kurang mengamati buku-buku bacaan apa saja yang dibaca oleh para peserta di komunitas baca. Hal ini terkait dengan rendahnya akses terhadap bacaan yang terkonfirmasi dari hasil survei Badan Pusat Statistik

(BPS) mengenai persentase penduduk di atas 10 tahun yang mengakses media (televisi) ketimbang surat kabar/majalah. Persentase penduduk Indonesia yang menonton televisi pada 2009-2015 mencapai lebih dari 90 persen, sementara warga yang mendengarkan radio dan membaca surat kabar cenderung menurun. Pada 2009, pendengar radio sekitar 23,50 persen menjadi 7,5 persen di tahun 2015. Sedangkan pembaca surat kabar sekitar 18,94 persen di tahun 2009, menjadi 13,11 persen di tahun 2015 (Puslitjakdikbud, 2019).

Data lainnya bila komparasi tentang ketertarikan pada aktivitas membaca di komunitas baca dengan mengakses media sosial, maka ada *gap* yang cukup mencengangkan. Hasil riset situs HootSuite dan agensi marketing, *We Are Social* bertajuk "*Digital 2021: Global Overview Reports*" menyatakan jumlah pengguna media sosial telah meningkat lebih dari 13 persen dalam satu tahun terakhir. Laporan yang dirilis akhir Januari tahun ini, menyebutkan pada tahun 2020 lalu, rata-rata lebih dari 1,3 juta pengguna baru bergabung dengan beragam *platform* media sosial setiap harinya. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang kecanduan media sosial. Posisi Indonesia sendiri berada di peringkat 9 dari 47 negara yang dianalisis. Kecanduan mengakses media sosial dinilai dari rata-rata masyarakat Indonesia menggunakan media sosial, yaitu selama 3 jam 14 menit. Raihan waktu itu lebih tinggi dari rata-rata global selama 2 jam 25 menit. Pertanyaan statistiknya, berapa lama waktu orang Indonesia habiskan untuk *browsing* internet? Jawabannya, Indonesia menduduki peringkat delapan dari 47 negara terbanyak menghabiskan waktu mengakses internet. Rerata warga Indonesia menghabiskan 8 jam 52 menit untuk berselancar di Internet. Perolehan tersebut sedikit lebih rendah dari warga di Malaysia yang menghabiskan 9 jam 17 menit di internet. Peringkat tertinggi dalam kategori ini ada pada warga Filipina dengan total waktu 10 jam 56 menit (Kemp, 2021).

Bagaimana menafsirkan beragam *datum* di atas? Pertama, kemampuan membaca dalam buku dan membaca teks di media sosial memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya, ada pada membaca teks, yang satu ada di buku, yang satunya di layar digital. Perbedaannya, kemampuan membaca di buku membutuhkan waktu lebih lama dengan mengerti alur atau sistematika, sedangkan pada media sosial, umumnya kemampuan membaca lebih cepat. Kedua, adanya komparasi atas faktor kelelahan mata dalam membaca baik melalui buku dan media sosial (layar media digital: *smartphone*, laptop, tablet komputer, *kindle*, komputer PC). Faktor kelelahan membaca lebih mudah ketika membaca teks di layar media digital ketimbang

membaca teks di buku. Walaupun ada teknologi dari Amazon yaitu *kindle ebook* yang menyediakan bacaan layaknya membaca buku secara digital, tetapi membaca buku langsung menjadi lebih tidak lelah atau daya tahan membacanya lebih tahan lama. Ketiga, dalam membaca di media sosial, *netizen* ada pada tendensi logika jangka pendek, yang lebih mengandalkan kecepatan dan informasi cepat berubah sejalan dengan informasi yang massif. Kemampuan literasi dalam membaca buku membuat para pembaca lebih teliti, membutuhkan ketelatenan, dan kemampuan untuk memetakan beragam teks yang panjang untuk digabungkan dalam konteks keseluruhan dalam isi buku.

Hal lain terkait kelalaian (*demi kelalaian*) yang membuat kedua peneliti lupa pada tujuan mendasar dibentuknya *civic literacy* yaitu untuk menjadikan warga negara memiliki informasi yang baik (*the well-inform citizens*) dalam tautannya dengan *res publica* (Brookhiser, 2006). Tujuan mendasar tersebut memiliki dua konsekuensi yaitu aksesibilitas dan akseptabilitas. Aksesibilitas terkait kemampuan warga negara untuk memiliki akses untuk berpartisipasi dalam politik. Warga negara bisa mengakses apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan bisa terlibat juga dalam aktivitas *pro bono publicum*. Akseptabilitas adalah dengan kemampuan literasi (tentu pada tingkat *advance*), warga negara mampu menerima beragam informasi (baik hasil bacaan di buku, maupun di sosial media) dan melakukan *fact checking* untuk menghindari terjadinya *hoax*. Warga negara dengan kemampuan aksesibilitas dan akseptabilitas bisa menjadi bagian untuk ikut menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi (Epstein, 2014).

Lantas, pertanyaan kritis dari Henry Milner di atas mesti dijawab, apa yang perlu dihasilkan dan dipertahankan dalam *civic literacy*? Hal yang perlu dihasilkan dari adanya gerakan-gerakan *civic literacy* adalah pertama, kemampuan para warga muda untuk memiliki kemampuan kritis pada dirinya. Hal ini sejalan dengan konsep yang dihembuskan oleh Chris Jenkins (2004) bahwa perlu adanya sikap kritis pada pembacaan teks-teks sastra dan budaya. Kekritisan yang dimaksud terkait dengan aksesibilitas dan akseptabilitas yang perlu diajarkan pada warga negara muda sebagai *citizen in potentia*, yang memiliki potensi untuk memajukan demokrasi. Hal ini mengingatkan pada kutipan dari Daoed Joesoef tentang keterkaitan antara peran warga, literasi, dan demokrasi. Ia menulis, “demokrasi hanya akan berkembang di suatu masyarakat yang para warganya adalah pembaca, adalah individu-individu yang merasa perlu untuk membaca, bukan sekadar pendengar dan gemar berbicara.” (Joesoef, 2004).

Pesan tersebut mengisyaratkan bahwa *civic literacy* ada dalam

perwujudan dari *civic engagement*, dengan berada dalam kolektivitas sosial (Dudley & Gitelson, 2002). Identifikasi tentang kewarganegaraan tersebut terkait dengan kewajiban yang setara dengan hak, kewajiban pada komunitas dan pada individu itu sendiri. Hal ini mau menyatakan bahwa jiwa dari *young citizen* telah menjadi obyek pemerintah melalui keahlian mereka (Jenks, 2005; Turner, 1986).

Pertanyaan berikutnya, apa yang perlu dipertahankan dalam *civic literacy*? Yang perlu dipertahankan dalam kemelekwacanaan dalam pendidikan kewarganegaraan ada pada kemampuan pikiran. Hal tersebut akan saya jelaskan dari *insight* Myra Zarnowski, seorang professor di Department of Elementary and Early Childhood Education at Queens College, CUNY.

4. Evaluasi Melalui Ekperimen Pikiran Zarnowski

Pintu masuk untuk memahami dan mempraktikkan *civic literacy* bisa melalui *thought experiment* (eksperimen pikiran) (Zarnowski, 2009). *Thought experiment* mampu merangsang imajinasi dan dengan demikian membuat kegiatan membaca menjadi menarik. Zarnowski (2009: 55) menulis demikian:

“Thought experiments enable students to think about persistent social issues by drawing on both knowledge and imagination. In this article, the author provides examples of thought experiments found in literature for adults and middle school students, a rationale for doing thought experiments in the classroom, a step-by-step procedure to follow, and a rubric for evaluating student work.”

Pesan yang hendak disampaikan Zarnowski bahwa eksperimen pikiran memungkinkan para pelajar untuk berpikir secara apriori tentang masalah sosial. Apriori, oleh karena para pelajar (baik dalam pendidikan formal maupun non formal) mampu untuk mengembangkan pengetahuan dan imajinasinya. Kedua yang disebut terakhir inilah yang menjadi unsur penting bagi *civic literacy*. Unsur penting, bilamana ada kemampuan dari para penggerak komunitas baca untuk mengondisikan *milieu* ruang baca dan para pesertanya saling mengenal satu dengan yang lainnya. Bila dikaitkan dengan evaluasi pada *civic literacy*, maka *thought experiment* dilakukan di kelas dengan prosedur yang dibuat guru atau tentor dengan berproses setahap demi setahap, melakukan narasi, menceritakan ulang, membuat rubrik tugas sebagai bentuk evaluasi pekerjaan para pelajar.

Pertanyaan yang penting dalam kaitannya dengan penelitian yang dilakukan Armawi dan Raharjo yaitu: bagaimana metode *thought experiment*

Zarnowski bisa digunakan untuk membentuk etika warga negara? Dalam pengamatan kedua peneliti, ada yang menarik bahwa adanya *sense of belonging* dan sikap toleran dari para peserta di rumah baca. Ringkasnya, ada sikap dasar yang saya sebut di atas muncul karena faktor budaya yang telah ada dalam diri para peserta yaitu dimensi kebersamaan (Gultom, 2019). Pada bagian observasi ini, saya sepakat bahwa dengan adanya kedua sikap tersebut, bisa memungkinkan tingkat baca para peserta berada pada pengondisian di mana akan memunculkan ketertarikan, imajinasi, dan adanya pertukaran informasi melalui dialog antar peserta.

Dalam melakukan tingkat pembacaan yang tinggi (*advance*), para peserta sebaiknya diajak untuk membaca buku yang menyimpan enigma. Hal pembacaan ini menjadi penting, karena warga negara memerlukan pembacaan kritis untuk membongkar agenda tersembunyi (*hidden agenda*) dari para pembuat kebijakan yang nantinya memiliki konsekuensi bagi akses keadilan dan perolehan hak. Maka, tujuan membaca dengan eksperimen pikiran bisa memecahkan enigma atau teka-teki dengan mengetahui duduk persoalan, lalu memberi beragam alternatif solusi dengan membaca. Artinya ada *skill* membaca dengan melatih seseorang melakukan eksperimen pikiran. Skill membaca tersebut memerlukan abstraksi dan imajinasi (Gultom, 2018). Misi besarnya adalah ketika para guru atau tutor menangani literasi dan kesadaran sosial sebagai aspek pemahaman bacaan, mereka melakukan lebih dari sekadar mengajar anak-anak membaca kata-kata dan memahami inti dari teks untuk menangani misi kewarganegaraan baik dalam pendidikan formal maupun pendidikan non formal (Zarnowski, 2009).

Kesimpulan

Kerapuhan evidensi dalam *civic literacy* dapat disimpulkan sebagai berikut, *pertama* konten penelitian yang dikaji oleh Armawi dan Raharjo memuat patahan epistemologis (*the epistemological break*). Patahan tersebut ada karena kecerobohan kedua peneliti yang tidak mendasarkan penelitiannya pada *grand design* manajemen riset dan *data series*, yaitu mengabaikan penelitian mereka sebelumnya (di tahun 2017) dan melakukan evaluasi penelitian dengan lokus yang sama (di tahun 2019) dan naskah yang terpublikasi di tahun 2021. Analisis ini ditemukan dengan melakukan *highlight* yaitu berfokus pada *trouble mapping*.

Kerapuhan evidensi yang *kedua* ada pada konten *civic literacy* karena evaluasi kedua peneliti meleset dengan menghadirkan minus data sehingga capaian puncak pada *civic literacy* bukan terarah pada *the well-inform citizens*, tetapi berkuat pada bias ekplanasi yang ada pada etika. Bias eksplanasi yang terjadi pada kedua peneliti karena menarik (dan membuat tafsiran) terlalu

jauh proses *civic literacy* pada etika. Kerapuhan evidensi pada konten *civic literacy* juga karena adanya kelupaan pada tingkat pemahaman literasi para peserta dan ketiadaan eksperimen pikiran sebagai pintu masuk bagi peserta di tingkat *advance* dalam *civic literacy*.

Rekomendasi penelitian ini terarah pada *civic literacy* yang memuat struktur tentang tema-tema bacaan dan nilai-nilai kewargaan yang bisa menjawab kebutuhan warga negara. Implikasinya, keterlibatan warga untuk peka mewujudkan keadilan sosial

Daftar Pustaka

- Armawi, A., & Raharjo, R. (2021). Evaluasi Program Sosialisasi Civic Literacy Dalam Pembentukan Etika Warganegara Muda. *Jurnal Filsafat*, 31(1), 1-23.
- Bartels, L. M. (1996). Uninformed Votes: Information effects in presidential elections. *American Journal of Political Science*, 194-230.
- Brookhiser, R. 2006. What would the founders do? Our questions, their answers. New York: Basic Books.
- Converse, P. E. (2006). The Nature of Belief Systems In Mass Publics (1964). *Critical Review*, 18(1-3), 1-74.
- Dudley, R. L., & Gitelson, A. R. (2002). Political literacy, civic education, and civic engagement: A return to political socialization?. *Applied Developmental Science*, 6(4), 175-182.
- Epstein, S. E. (2014). Teaching Civic Literacy Projects: Student Engagement With Social Problems, Grades 4-12. Teachers College Press.
- Golebiewski, M., & Boyd, D. (2018). Data Voids: Where missing data can easily be exploited.
- Gultom, A. F. (2018). Kerapuhan Imajinasi Dalam Politik Kewargaan The Fragility of Imagination In The Politic of Citizenship. dalam Seminar Nasional Kebudayaan 2 “Indonesia Sebagai Ruang Imajinasi – Memaknai 73th Indonesia Merdeka”. Malang: Universitas Brawijaya
- Gultom, A. F. (2019). Metafisika Kebersamaan Dalam Lensa Gabriel Marcel. *Antropologi Metafisika & Isu-Isu Kekinian*, 1.
- Gultom, A. F., Munir, M., & Ariani, I. (2019). Perubahan Identitas Diri Dalam Eksistensialisme Kierkegaard: Relevansinya Bagi Mental Warga Negara Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(2), 77-84.
- Jenks, C. (2005). *Childhood, Critical Concepts in Sociology* (vol. III). USA and Canada: Routledge

- Jenks, C. (Ed.). (2004). *Urban culture: critical concepts in literary and cultural studies* (Vol. 1). Taylor & Francis.
- Joesoef, Daoed. 2004. *Bukuku Kakiku*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kemp, S. (2021, January 27). *Digital 2021: The Latest Insights into The State of Digital*. <https://wearesocial.com/blog/2021/01/digital-2021-the-latest-insights-into-the-state-of-digital>
- Marshall, T.H. (1963). *Citizenship and Social Class*, in *Sociology at the Cross-roads*, London: Heinemann.
- Milner, H. (2002). *Civic Literacy: How informed citizens make democracy work*. Hanover & London: University Press of New England.
- Nurlinasari, L., & Hamid, S. I. (2018). Efektivitas Model Multiliterasi Kritis Dalam Mengembangkan Civic Literacy Siswa SD Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Civicus*, 18(2), 9-18.
- Puslitjakdikbud. (2019). *Indeks Aktivitas Literasi Membaca 34 Provinsi*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Raharjo, R., Armawi, A., & Soerjo, D. (2017). Penguatan Civic Literacy Dalam Pembentukan Warga Negara Yang Baik (Good Citizen) Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Warga Negara Muda (Studi Tentang Peran Pemuda HMP PPKn Demokratia pada Dusun Binaan Mutiara Ilmu di Jebres, Surakarta, Jawa Tengah). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(2), 175-198.
- Sapir, E. (2004). *Language: An Introduction to the Study of Speech*. Courier Corporation.
- Sudibyo, A. (2010). Masyarakat Warga dan Problem Keberadaban. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 14(1), 23-46.
- Terry, G.R. (1968). *Principles of Management*. Illions: Richard D. Irwin, Inc.
- Turner, B.S. . (1986). *Citizenship and Capitalism*. London: Allen & Unwin
- Winarno. (2011). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Zarnowski, M. (2009). The Thought Experiment: An Imaginative Way Into Civic Literacy. *The Social Studies*, 100(2), 55-62.